



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **UNTI LUDIGDO**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **519830**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 6.101.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/240 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 890.000.000
2. Tanah Seluas 389 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/120 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
4. Tanah Seluas 394 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 675.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 362 m2/360 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000.000
6. Tanah Seluas 792 m2 di KAB / KOTA TRENGGALEK, HASIL SENDIRI Rp. 86.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 293.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOBIL, TOYOTA MPV Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. MOBIL, NISAN MARCH Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000



5. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
16.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 112.700.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 979.757.450

F. HARTA LAINNYA Rp. 90.000.000

Sub Total Rp. 7.576.457.450

III. HUTANG Rp. 50.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 7.526.457.450

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.